

Judul : Gubernur Jakarta Dipilih Lewat Pilkada
Tanggal : Selasa, 12 Maret 2024
Surat Kabar : Hukum Online
Halaman : 14

■ PILKADA DKI JAKARTA

Gubernur Jakarta Dipilih Lewat Pilkada

JAKARTA. Wacana penghapusan Pilkada di DKI Jakarta, yang termuat dalam Rancangan Undang-Undang tentang Daerah Khusus Jakarta (RUU DKJ) masih menuai polemik. Apalagi di draf lama masih mencantumkan poin bahwa Gubernur DKI Jakarta akan dipilih atau ditunjuk oleh presiden, bukan melalui proses pemilihan langsung (pilkada) seperti selama ini.

Sejumlah partai politik (parpol) angkat bicara atas rencana gubernur DKI Jakarta di-

Wacana Gubernur DKI Jakarta ditunjuk oleh presiden tidak tepat.

tunjuk presiden. Partai Persatuan Pembangunan (PPP) berkomitmen DKI Jakarta tetap melaksanakan Pilkada pada 2024 untuk menentukan gubernur dan wakil gubernur. "PPP sejak awal berkomitmen bahwa pilkada langsung di Jakarta," ungkap Ketua PPP, Achmad Baidowi saat dikonfirmasi KONTAN, kemarin.

Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Viva Yoga Mauladi juga menyatakan sebagian besar anggota fraksi di Dewan Perwakilan

Rakyat (DPR) menyatakan ingin pilkada di DKI secara langsung. Artinya, PAN menentang apabila pemilihan gubernur dan wakil gubernur ditetapkan dengan mekanisme lainnya, termasuk ditunjuk oleh presiden. "Sebagaimana besar fraksi menyatakan pilkada DKI langsung," ujar dia.

Demikian pula Partai Demokrat. Deputi Badan Pemantauan Pemilu (Bappilu) DPP Partai Demokrat Kamhar Lakumani mengakui pembahasan UU DKJ menjadi sorotan publik, utamanya terkait pemilihan kepala daerah. "Partai Demokrat menilai penunjukan gubernur DKI Jakarta oleh presiden adalah aspirasi yang tidak tepat," tandas dia.

Partai Keadilan Sejahtera (PKS) juga menolak wacana gubernur DKI ditunjuk presiden. "Kami akan perjuangkan DKJ ada pilkada," ujar Mardani Ali Sera, Anggota DPR Fraksi PKS.

Sebelumnya rapat paripurna DPR RI menyetujui RUU Provinsi Daerah Khusus Jakarta (RUU DKJ) menjadi RUU usulan DPR. RUU ini mengatur status Jakarta jika ibu kota negara sudah pindah ke Ibu Kota Nusantara. Salah satu poin yang menuai polemik di calon beleid ini terkait mekanisme pilkada DKI Jakarta yang dipilih oleh presiden, bukan rakyat langsung.

Leni Wandira, Vendy Susanto